



# **INDIKATOR KINERJA UTAMA 2020**

**Pengadilan Agama Yogyakarta Kelas IA**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA  
TAHUN 2020**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah sisa perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan}} \times 100\%$ <p><b>Catatan:</b> Sisa perkara : sisa perkara tahun sebelumnya</p> <p>Persentase jumlah sisa perkara yang diselesaikan dengan sisa perkara yang harus diselesaikan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah perkara yang ada}} \times 100\%$ <p><b>Catatan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk)</li> <li>• Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya.</li> <li>• Penyelesaian perkara tetap waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan.</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			<p>Persentase jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan dengan jumlah perkara yang ada</p>		
		<p>c. Persentase penurunan sisa perkara</p>	$\frac{Tn.1 - Tn}{Tn.1} \times 100\%$ <p>Tn = Sisa perkara tahun berjalan  Tn.1 = Sisa perkara tahun sebelumnya  <b>Catatan:</b>  Sisa perkara adalah perkara yang belum diputus pada tahun berjalan</p> <p>Persentase sisa perkara tahun berjalan dengan sisa perkara tahun sebelumnya</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		<p>d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Banding</li> <li>- Kasasi</li> <li>- PK</li> </ul>	$\frac{\text{Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum}}{\text{Jumlah putusan perkara}} \times 100\%$ <p><b>Catatan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•Upaya hukum = banding, kasasi, PK</li> <li>•Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			Persentase jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum dengan jumlah putusan perkara		
		e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <b>Index kepuasan pencari keadilan</b> </div> <p><b>Catatan :</b>            PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang pedoman umum penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit layanan Instansi Pemerintah sesuai peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.</p> Persentase responden pencari keadilan yang puas dengan jumlah responden pencari keadilan seluruhnya	Panitera	Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak waktu	$\frac{\text{Jumlah isi putusan yang tidak diterima tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
	Penyelesaian perkara		Persentase jumlah putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu dengan jumlah putusan		
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi}}{\text{Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi}} \times 100\%$ <p><b>Catatan:</b> Perma No.1 Tahun 2018 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan</p> <p>Persentase jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi dengan jumlah perkara yang dilakukan mediasi</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan Kasasi dan PK secara lengkap}}{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan upaya hukum}} \times 100\%$ <p>Persentase berkas perkara yang dimohonkan kasasi dan PK secara lengkap dengan jumlah</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			berkas perkara yang dimohonkan upaya hukum		
		d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	$\frac{\text{Jumlah amar putusan perkara ekonomi syariah yang di upload dalam website}}{\text{Jumlah perkara prodeo}} \times 100\%$ <p>Persentase jumlah amar putusan perkara ekonomi syariah yang diupload dalam website dengan jumlah putusan perkara.</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara) yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara prodeo}} \times 100\%$ <p><b>Catatan:</b> Perma No.1 Tahun 2014 tentang pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan.</p> <p>Persentase jumlah perkara prodeo (Pembebasan Biaya Perkara) yang diselesaikan dengan jumlah perkara prodeo (Pembebasan Biaya Perkara)</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		b. Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum	$\frac{\text{Jumlah perkara voluntair identitas Hukum yang diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara voluntair identitas Hukum yang diajukan}} \times 100\%$ <p><b>Catatan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perma No.1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu sidang keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah dalam rangka penerbitan akta perkawinan, buku nikah dan akta kelahiran.</li> <li>• Sema No.3 Tahun 2014 tentang Tata cara pelayanan dan pemeriksaan perkara voluntair isbat nikah dalam pelayanan terpadu.</li> <li>• Identitas Hukum : Orang atau anak yang status hukumnya tidak jelas.</li> </ul> <p>Persentase jumlah perkara voluntair identitas hukum yang diselesaikan dengan jumlah perkara voluntair identitas hukum yang diajukan (diantaranya perkara isbath nikah, perbaikan salah tulis nama)</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	$\frac{\text{Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang Mendapatkan layanan bantuan hukum}}{\text{Jumlah pencari keadilan golongan tertentu}} \times 100\%$ <p><b>Catatan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perma No.1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan.</li> <li>• Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal).</li> </ul> <p>Persentase jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum dengan jumlah pencari keadilan golongan tertentu.</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	$\frac{\text{Jumlah putusan perkara yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah putusan perkara yang sudah BHT}} \times 100\%$ <p><b>Catatan:</b> BHT : Berkekuatan hukum tetap.</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			Persentase jumlah putusan perkara yang ditindaklanjuti dengan jumlah putusan perkara yang sudah Berkekuatan Hukum Tetap		



Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta

Drs. H. Dedhy Supriady, MA  
NIP. 19591105 198703 1 003